

**PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM DAN PERIZINAN  
OLEH PRODI HUKUM UNIVERSITAS PELITA BANGSA  
KEPADA PT TUJUH ION INDONESIA**

**Arum Tarina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora  
Universitas Pelita Bangsa  
arum.tarina@pelitabangsa.ac.id

**Abstrak**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka ada banyak perubahan terhadap perizinan pada suatu perusahaan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah agar PT Tujuh Ion Indonesia sebagai salah satu stakeholder dari Universitas Pelita Bangsa mendapatkan penyuluhan hukum terkini dan pengetahuan atas dampak dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan PT Tujuh Ion Indonesia menggunakan metode penyuluhan. Hasil yang dicapai pada saat penyuluhan dan/atau konsultasi hukum dan perizinan di PT Tujuh Ion Indonesia adalah mengetahui update hukum dan sistem perizinan yang berlaku saat ini. Dimana perusahaan harus mulai fokus terhadap perubahan-perubahan hukum dan prosedur perizinan yang berlaku, tertib dalam pengelolaan kepatuhan baik dari segi perizinan maupun ke HRD-an.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan

**Abstract**

*Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has a goal to create a quality business and investment climate for business people, including MSMEs and foreign investors. With the Job Creation Law, there are many changes to the licensing of a company. The purpose of this community service is for PT Tujuh Ion Indonesia as one of the stakeholders from Pelita Bangsa University to get the latest legal counseling and knowledge on the impact of the Job Creation Law. In the community service carried out with PT Tujuh Ion Indonesia using the counseling method. The results achieved during counseling and/or legal and licensing consultations at PT Tujuh Ion Indonesia are knowing the current legal updates and licensing system. Where the company must begin to focus on changes to applicable laws and licensing procedures, orderly management of compliance both in terms of licensing and HRD.*

**Keywords:** Job Creation Law, Licensing

## PENDAHULUAN

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Tujuh Ion Indonesia dengan Program Studi Hukum Universitas Pelita Bangsa nomor 171/SL/31.NA/UPB/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 tentang Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Konsultasi Aspek Hukum dan Perizinan, maka sebagai upaya PT Tujuh Ion Indonesia. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkini tentang berbagai aspek terkait hukum dan perijinan usaha maka pada tanggal 21 Juli 2020 diadakan pemaparan materi tentang draft Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan. Pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah melaksanakan penyuluhan melalui webinar dengan tema Pro Kontra Draft UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yang membahas pasal-pasal yang akan diubah dan dicabut sehubungan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 2 November 2020 pemerintah mengundang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja). Adapun tujuan dari UU Cipta Kerja ini menurut Presiden Jokowi adalah untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing (Jokowidodo, 2020).

Dengan telah diundangkan UU Cipta Kerja ini maka PT Tujuh Ion Indonesia kembali meminta kepada Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa untuk memberikan paparan dan konsultasi hukum terkait dengan UU Cipta Kerja dan

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga pada tanggal 6 Agustus 2021 diadakan kembali Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Konsultasi Aspek Hukum dan Perizinan kepada PT Tujuh Ion Indonesia melalui daring.

Tujuan dari hasil pengabdian ini adalah agar PT Tujuh Ion Indonesia sebagai salah satu stakeholder dari Universitas Pelita Bangsa mendapatkan penjelasan hukum terkini khususnya perihal sistem perizinan terbaru dengan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat di akses melalui Online Single Submission (OSS), dan terkait dengan isu ketenagakerjaan yaitu tentang Peraturan Perusahaan. Dengan demikian PT Tujuh Ion Indonesia dapat mempersiapkan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE

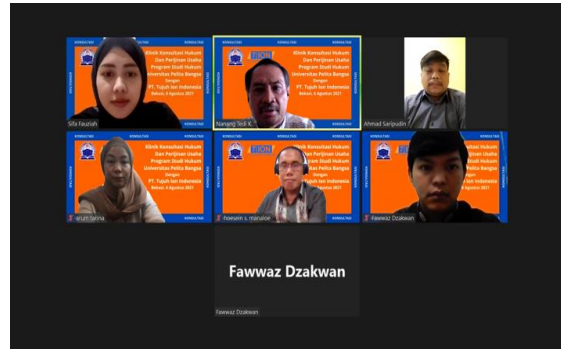
Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 pada saat Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan peran Perusahaan UMKM untuk memahami lebih jauh tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang dicabut atau diamandemen oleh UU Cipta Kerja. Strategi yang dilakukan agar pengabdian masyarakat dapat terlaksana tanpa melanggar protokol kesehatan dimana salah satunya tidak mengadakan kegiatan yang menciptakan kerumun adalah dengan menyelenggarakannya secara daring via zoom.us. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM di bidang teknologi informatika yaitu PT Tujuh Ion Indonesia dan dosen

Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Penyelenggara kegiatan ini adalah Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa bekerjasama dengan Departemen Kerjasama Universitas Pelita Bangsa. Metode pengabdian masyarakat di PT Tujuh Ion Indonesia menggunakan metode penyuluhan untuk diadakan konsultasi hukum dan perizinan oleh Prodi Hukum. Pada pelaksanaannya, dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi mengenai latar belakang terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Serta Peraturan Pemerintah terbaru yang telah diundangkan dan diterbitkan pasca UU Cipta Kerja tersebut. Serta pembahasan mengenai perubahan yang terjadi pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipaparkan oleh dosen Arum Tarina, S.H., LL.M.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyuluhan mengenai UU Cipta Kerja.

Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, tentu saja perusahaan-perusahaan harus segera memutakhirkan aspek hukum di perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan baru yang berlaku saat ini. Pada tahun 2020-2021 banyak sekali peraturan baru yang harus mulai di pelajari dan diterapkan, termasuk oleh PT Tujuh Ion Indonesia. PT Tujuh Ion Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Ahmad Saripudin (*Chief Finance Officer*) dan Ibu Sifa Fauziah (*Human Resource Development*).



**Gambar: Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum dan Perizinan**

Pemaparan yang disampaikan diantaranya adalah:

- Peraturan yang dicabut oleh UU Cipta Kerja, adalah:
  1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*).
- UU Cipta Kerja mengubah 79 Undang-undang beberapa diantaranya adalah:
  1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  4. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
  5. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Turunan/Pelaksana dari UU Cipta Kerja, diantaranya adalah:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6

- Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, download di sini. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui OSS merupakan pelaksanaan UU Cipta Kerja. OSS berbasis risiko diwajibkan untuk

digunakan oleh pelaku usaha. Sehingga sistem perizinan pada saat ini dan kedepannya akan mulai melalui daring/*online*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan juga Peraturan Bdan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Maka tiap pelaku usaha memiliki kewajiban perizinan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis risikonya.
- Pemaparan tentang perubahan-perubahan dalam UU ketenagakerjaan. Terutama mengenai perbandingan antara peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersasma.

PT Tujuh Ion Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Internet Service Provider, dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yaitu 61921. Sampai saat ini PT Tujuh Ion Indonesia belum mendaftarkan diri ke dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Saat ini jumlah pegawainya ada sekitar 20 orang. PT Tujuh Ion Indonesia termasuk dalam kategori usaha mikro kecil.

Hasil yang dicapai pada saat penyuluhan dan/atau konsultasi hukum dan perizinan di PT Tujuh Ion Indoensia adalah mengetahui update hukum dan sistem perizinan yang berlaku saat ini. Dimana perusahaan harus mulai fokus terhadap perubahan-perubahan hukum dan prosedur perizinan yang berlaku, tertib dalam pengelolaan kepatuhan baik dari segi perizinan maupun ke HRD-an.

## SIMPULAN DAN SARAN

### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa yang terdiri dari tim dosen memfokuskan kepada update peraturan UU Cipta Kerja dan update terhadap perkembangan kebijakan-kebijakan sistem hukum yang kini berlaku dimana didapatkan beberapa hasil yaitu:

1. Bahwa banyak pelaku usaha termasuk PT Tujuh Ion Indonesia yang sudah mengetahui adanya UU Cipta Kerja namun belum paham apa isi dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha mereka.
2. Telah dilakukan penyuluhan/konsultasi hukum dan perizinan usaha dimana dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap isi secara garis besar dari UU Cipta Kerja dan sistem perizinan yang kini berlaku terutama terkait dengan dibidang usaha PT Tujuh Ion Indonesia.

### **Saran**

Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin selama kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama, karena waktu yang tersedia juga terbatas, sedangkan bahasan materi hukum sangatlah luas. Lebih lanjut diharapkan dari adanya kegiatan ini maka dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum terutama hukum yang terkait dengan perusahaan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Departemen Kerjasama, Prodi Hukum, PT Tujuh Ion Indonesia yang telah memberikan dukungan tenaga, waktu dan teknis,

sehingga dapat dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Artikel/Jurnal**

- Daspar, Dkk. (2020). Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembuatan Produk Kerupuk Lele “Krule” Jurnal Abdimas Pelita Bangsa, 1(02), 73–77. Retrieved from <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jabmas/article/view/768/524>
- CNN Indonesia (2020). Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020, Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201102230532-32-565122/jokowi-teken-uu-ciptaker-1187-halaman-nomor-11-tahun-2020>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Peraturan Bdan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko